

STRATEGI KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN  
INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE DALAM UPAYA PEMBANGUNAN  
KOTA MAKASSAR MENUJU SMART CITY TAHUN 2016-2020



SKRIPSI

Disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata 1 (S1) pada  
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa Makassar

Oleh:

Mustyka Wulandari

4517023040

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Bosowa Makassar

2021

## Abstrak

Kerjasama berbasis *Smart City* yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam upaya pembangunan Kota Makassar merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah untuk menciptakan kota Makassar yang modern, layak huni, serta mewujudkan visi dan misi sebagai bagian dari kota dunia. Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama pada bidang pengelolaan perkotaan, transportasi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pariwisata, ekonomi, serta infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kerjasama Pemerintah Kota Makassar-*International Enterprise (IE) Singapore* dalam upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif eksplanatif, dimana penulis menggambarkan mengenai strategi kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam pembangunan *Makassar Smart City*. Data yang disajikan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran online berupa *e-journal*, artikel, berita online dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis kualitatif.

Kata kunci: Smart City, paradiplomasi, kerjasama Pemkot Makassar dengan IE Singapore



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Strategi Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan International Enterprise Singapore dalam Upaya Pembangunan Kota Makassar Menuju Smart City Tahun 2016-2020”. Skripsi disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Strata 1 (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, serta saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Arief Wicaksono, S.IP., MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.
2. Zulkhair Burhan, S.IP., MA, selaku dosen sekaligus Ketua Prodi yang telah membimbing serta memberi nasehat selama proses perkuliahan penulis.
3. Bapak Muh. Asy'ari, S.IP., MA, selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, nasehat, serta pengarahan dengan penuh kesabaran.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan penulis.
5. Orang tua serta keluarga besar yang telah memberi banyak dukungan.
6. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran yang dapat digunakan untuk penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang membacanya.

Makassar, 30 Agustus 2021

Penulis



Mustyka Wulandari

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR  
DENGAN INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE DALAM  
UPAYA PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR MENUJU SMART CITY  
TAHUN 2016-2020

Mustyka Wulandari

4517023040

Skripsi telah disetujui dan diperiksa oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A

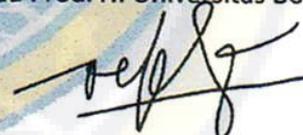
Mengetahui :

Dean FISIP Universitas Bosowa

Ketua Prodi HI Universitas Bosowa



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A



Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A.

## HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari Rabu, Tanggal Satu September Dua Ribu Dua Puluh Satu, dengan judul Skripsi  
**STRATEGI KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN  
INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KOTA  
MAKASSAR MENUJU SMART CITY TAHUN 2016-2020**

Nama : Mustyka Wulandari

No. Stambuk : 4517023040

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Telah Diterima oleh panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Bosowa untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu  
Hubungan Internasional.

### Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Arief Wicaksono, S.Ip., M.A

Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A

### Tim Penguji Skripsi

1. Muh. Asy'ari, S.Ip., M.A

( )

2. Beche Bt Mamma, S.Ip., M.A

( )

3. Arief Wicaksono, S.Ip., M.A

( )

4. Zulkhair Burhan, S.Ip., M.A

( )

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang Bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : Mustyka Wulandari

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Judul Skripsi : **STRATEGI KERJASAMA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DENGAN INTERNATIONAL ENTERPRISE SINGAPORE DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KOTA MAKASSAR MENUJU SMART CITY TAHUN 2016-2020**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam Skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik Sebagian maupun Seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Peneliti Sebelumnya maupun Jurnal Terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila Karya Ilmiah atau Penulisan Skripsi ini terbukti duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima Sanksi Akademik berupa Pencabutan Gelar dan Sanksi Hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggung jawaban ilmiah tanpa ada tekanan dan juga paksaan dari pihak manapun.

Makassar, 01 September 2021

Penulis,



Mustyka Wulandari

## DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
Abstrak.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENERIMAAN.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Batasan dan Rumusan Masalah</b> .....	4
1. Batasan Masalah.....	4
2. Rumusan Masalah.....	4
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	5
<b>D. Kerangka Konseptual</b> .....	6
1. Konsep Paradiplomasi.....	6
2. Konsep <i>Smart City</i> .....	7
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	9
1. Tipe Penelitian.....	9
2. Jenis dan Sumber Data.....	9
3. Teknik Pengumpulan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data.....	9
<b>F. Rancangan Sistematika Pembahasan</b> .....	10
BAB II.....	11
TELAAH PUSTAKA.....	11
<b>A. Paradiplomasi</b> .....	11
<b>B. Smart City</b> .....	15
1. Indikator Smart City.....	16
2. Unsur dan Faktor-Faktor Smart City.....	18
BAB III.....	20
GAMBARAN UMUM.....	20

<b>A. Kota Makassar dan Smart City .....</b>	<b>20</b>
<b>B. International Enterprise (IE) Singapore .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan IE Singapore .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>35</b>
<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
<b>A. Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam upaya pembangunan kota berbasis Smart City</b>	<b>36</b>
<b>a. Pemetaan kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan IE Singapore.....</b>	<b>36</b>
<b>b. Pemerintah Kota Makassar Melakukan Inovasi .....</b>	<b>37</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>41</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>41</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>41</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>42</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>43</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>45</b>
<b>PASAL 1 .....</b>	<b>45</b>
<b>PASAL 2.....</b>	<b>46</b>
<b>PASAL 3.....</b>	<b>47</b>
<b>PASAL 4.....</b>	<b>47</b>
<b>PASAL 5.....</b>	<b>47</b>
<b>PASAL 6.....</b>	<b>48</b>
<b>PASAL 7.....</b>	<b>48</b>
<b>PASAL 8.....</b>	<b>49</b>
<b>PASAL 9.....</b>	<b>49</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Suatu kerjasama antara Pemerintah Kota dengan sesama Pemerintah Kota dari negara lain atau pun lembaga asing dalam rangka mencapai kepentingan masing-masing pihak merupakan suatu agenda yang telah banyak dilakukan oleh aktor *sub-state* yang ada di seluruh dunia. Kerjasama tersebut kemudian berkaitan dengan apa yang disebut dengan Paradiplomasi. Jika mengacu pada pengetahuan khalayak umum yang menurut penulis tentu memiliki perbedaannya masing-masing, paradiplomasi dapat dikatakan sebagai suatu studi baru dalam Ilmu Hubungan Internasional. Menurut Takdir Ali Mukti, dalam jurnalnya yang berjudul *Paradiplomacy*, suatu kegiatan kerjasama, hubungan internasional atau hubungan luar negeri yang dilakukan oleh entitas subnasional, sub-negara dan atau regional yang dilaksanakan dalam rangka mencapai kepentingan masing-masing pihak yang terlibat secara spesifik disebut dengan istilah Paradiplomasi. Paradiplomasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan rancangan yang melibatkan peran dan kemampuan aktor-aktor *sub-state* dalam menjalankan suatu hubungan internasional. Studi paradiplomasi ini memberikan kita pemahaman dalam melihat hubungan internasional dari berbagai macam sisi, jadi kita dapat mengamati hubungan internasional hingga di luar dari isu-isu politis yang didominasi oleh negara (Takdir Ali Mukti, 2015).

Kegiatan yang dulu hanya dapat dilakukan oleh negara, sekarang juga dapat dijalankan oleh aktor non-negara. Aktor non-negara yang dimaksud adalah *Multinational Corporations (MNC)*, organisasi regional, organisasi internasional, individu, dan aktor sub-nasional yang merupakan badan dari suatu negara. Aktor non-negara disini memiliki peran dalam mempengaruhi keputusan negara sembari menghadapi permasalahan internasional. Kerjasama merupakan hal yang penting untuk dilakukan guna menyelesaikan berbagai permasalahan

yang merupakan dampak dari globalisasi. Kerjasama oleh aktor non-negara sangat berkontribusi dalam sistem internasional. Kontribusi Pemerintah Daerah contohnya, sebagai aktor *sub-state* yang distimulasi oleh globalisasi sehingga dapat melakukan aktivitas paradiplomasi.

Dengan mempelajari paradiplomasi atau kerjasama berbasis *sub-state*, kita dapat memperoleh kemudahan dalam meneliti kemudian menjelaskan suatu fenomena yang berkaitan, seperti bagaimana kota-kota yang ada di dunia ini bekerjasama dan bagaimana hasil akhir yang diperoleh dari suatu kerjasama tersebut. Seperti dalam kegiatan paradiplomasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar bersama dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam upaya mengoptimalkan pembangunan guna mengintegrasikan Kota Makassar menuju *Smart City*.

*International Enterprise (IE) Singapore* ini sendiri merupakan lembaga Pemerintahan Singapura yang memperjuangkan pengembangan dan inovasi pembangunan negara maupun kota yang berbasis internasional, bukan hanya dalam lingkup nasional negara Singapura saja. Pemerintah negara Singapura menjalankan kesepakatan dengan *SPRING (Standards, Productivity and Innovation Board) Singapore* pada tanggal 1 April 2018, sebagai satu agensi yang kemudian membentuk lembaga *International Enterprise (IE) Singapore*.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Makassar bersama dengan *International Enterprise (IE) Singapore* resmi menandatangani *MoU (Memorandum of Understanding)*. *International Enterprise (IE) Singapore* disini bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Singapura untuk pengembangan Kota Makassar dengan kerjasama yang berbasis paradiplomasi *Smart City* dalam beberapa bidang, yang kemudian memiliki kaitan dengan fokus pembahasan penulis pada penelitian ini.

Sesuai dengan apa yang diuraikan di atas, diketahui bahwa memang hal-hal yang menjadi sesuatu yang paling disoroti di Kota Makassar adalah berupa pengelolaan perkotaan yang kurang optimal, dampak pembangunan terhadap lingkungan, dan infrastruktur dalam hal pengendalian pembangunan, yang dihadapi dan dirasakan oleh masyarakat kota Makassar itu sendiri. Hal-hal tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama berbasis paradiplomasi dan penerapan program *Smart City* yang dijalankan. Dan tentu saja, bagi penulis maupun masyarakat, hal tersebut merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam lingkungan hidup masyarakat kota Makassar. Kota Makassar memang merupakan salah satu kota dengan pembangunan yang pesat, sehingga dijuluki sebagai kota dunia dan terus berinovasi demi julukan *Smart City*.

Dalam pembuatan suatu penelitian, harus didasarkan pada fokus pembahasan yang berbeda meskipun berasal dari fenomena yang sama. Berdasarkan apa yang telah penulis pelajari dan cermati, kerjasama antara kedua belah pihak yang disebut dengan paradiplomasi telah banyak dijadikan suatu topik penelitian oleh berbagai pihak, namun yang menjadi fokus pembahasannya adalah mengenai pencapaian keuntungan dari agenda yang dilakukan. Namun pada kenyataannya, yang diperoleh dan dirasakan sebagian besar adalah ketidaksesuaian antara kenyataan dengan harapan. Disini penulis akhirnya sadar bahwa selain sisi keuntungan dan pencapaian yang berjalan dengan mulus hingga berhasil, dalam melakukan suatu kerjasama maupun hubungan saling menguntungkan, tentu tidak lepas juga dari ketimpangan yang mungkin sengaja atau tidak sengaja luput dari perhatian. Maka dari itu, penulis akan mempersembahkan suatu penelitian dengan topik dan fokus pembahasan berdasarkan judul yang dilampirkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk menyusun sebuah tugas akhir yang berjudul “Strategi Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dengan *International Enterprise Singapore* Dalam Upaya Pembangunan Kota Makassar Menuju *Smart City* Tahun 2016-

2020". Kegiatan Paradiplomasi *Smart City* yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar salah satunya yaitu pengembangan *Makassar Smart City* yang terjalin dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam beberapa bidang sebagai dasar dari pengembangan dan upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*. Hal-hal tersebut yang kemudian membuat penulis antusias untuk membahasnya disini. Maka, dalam tugas akhir ini, penulis membahas mengenai strategi dari kegiatan Paradiplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* sebagai upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah, maka pembahasan tugas akhir ini akan dibatasi pada fokus pembahasan dan penelitian, yaitu hanya akan menjelaskan mengenai strategi suatu kerjasama berbasis paradiplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar bersama dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*.

### **2. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan proses dan penyusunan tugas akhir ini, penulis merumuskan masalah ke dalam bentuk kalimat pertanyaan yang spesifik, sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam implementasi program *Smart City* terhadap Kota Makassar?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- Untuk mengetahui strategi kerjasama yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar bersama dengan *International Enterprise (IE) Singapore* sebagai upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat ke beberapa pihak, antara lain :

- Manfaat bagi Penulis dan Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar. Dan bagi masyarakat sendiri yaitu dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk bisa menghadapi bahkan menanggulangi masalah yang muncul dari suatu proses yang dijalankan oleh pemerintah.

- Manfaat bagi Universitas

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi akademis dalam melakukan penelitian lebih lanjut oleh para akademisi.

- Manfaat bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan analisis dalam pelaksanaan kerjasama berbasis paradiplomasi baik dalam program yang spesifik berupa *Smart City* maupun program-program pengembangan kota lainnya.

## **D. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini, penulis ingin menunjukkan strategi kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam implementasi program *Smart City* terhadap Kota Makassar. Kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep Paradiplomasi dan Konsep *Smart City*.

### **1. Konsep Paradiplomasi**

Paradiplomasi sendiri merupakan sebuah konsep yang merujuk pada praktek diplomasi yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. Selayaknya diplomasi, paradiplomasi ini juga dilakukan oleh aktor non-negara dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan mereka yang berafiliasi. Konsep paradiplomasi ini memungkinkan terjadinya kondisi dimana kepentingan para aktornya ternyata bertentangan dengan keadaan yang ditimbulkan. Hadirnya suatu fenomena globalisasi menimbulkan banyak dampak, termasuk adanya pergeseran dalam Hubungan Internasional dimana negara bukan lagi menjadi satu-satunya aktor penting dalam pembuatan kebijakan dalam mencapai kepentingan. Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan untuk mencapai kepentingan nasional secara khusus yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Kemunculan aktor-aktor baru dalam Hubungan Internasional menjadikan format diplomasi berkembang menjadi "*the foreign policy and non-central government*", yang disebut dengan paradiplomasi. Kehadiran paradiplomasi memberikan kesempatan kepada aktor selain pemerintah pusat seperti kelompok, organisasi, individu, maupun pemerintah daerah untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Pemerintah daerah muncul sebagai aktor baru dalam Hubungan Internasional dan semakin membuka gerbang bagi dunia luar, bahkan antara *Person to Person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung (Takdir Ali Mukti, 2013).

Paradiplomasi ini merupakan salah satu konsep yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan *IE Singapore* sebagai strategi kerjasama dalam implementasi pembangunan dan pengembangan Kota Makassar.

## **2. Konsep *Smart City***

Konsep *Smart City* mulai diperkenalkan pada tahun 2009, konsep ini lahir setahun setelah kekacauan ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2008. Konsep *Smart City* mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan kota, taraf hidup warga kota dan keberlangsungan hidup serta pembangunan kota.

Perkembangan kota yang semakin mengkhawatirkan yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan berbagai masalah yang harus diselesaikan dengan cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan matang, tidak menutup kemungkinan dapat dimaksimalkannya pembangunan untuk menstimulasi kota, dalam hal ini terkhusus Kota Makassar yang sedang mencari berbagai metode yang sesuai guna memecahkan masalah perkotaan yang ada.

Kota Makassar sebagai *Smart City* menjadi bagian dari program Pemerintah Kota guna menjadi masyarakat global. Inisiatif dari Pemerintah Kota menjadi suatu keharusan untuk bekerjasama dengan pihak asing dalam mengambil langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kemajuan kota yang dalam isu ini ingin menciptakan *Makassar Smart City*. Dalam konteks ini, pemerintah kota Makassar dituntut untuk bisa melakukan inovasi, kreasi serta improvisasi dalam pembangunan kota.

Konsep *Smart City* merupakan sebuah bentuk strategi kebijakan yang diterapkan untuk menjawab harapan masyarakat dengan semakin majunya dunia oleh teknologi. Dengan tuntutan tersebut, mengakibatkan masyarakat memiliki obsesi untuk menikmati kota yang bisa

melayani dengan cepat, tepat dan efisien. Gagasan kota berbasis *Smart City* merupakan harapan kota agar lebih maju dalam menjawab tantangan zaman. Kerjasama dalam program *Smart City* terbagi dalam 9 (sembilan) kategori, antara lain;

1. *Smart Energy*,
2. *Smart Building*,
3. *Smart Mobility*,
4. *Smart Technology*,
5. *Smart Infrastructure*,
6. *Smart Governance and Education*,
7. *Smart Health Care*,
8. *Smart Citizen*,
9. *Smart Security*.

Tentunya program-program tersebut sangat baik dan diharapkan menjadi langkah yang tepat untuk membuktikan visi Kota Makassar yaitu menjadi *Smart City*.

Dalam membentuk sebuah *Smart City* bukanlah hal yang mudah. Membutuhkan *smart plan* yang harus baik pula, *smart partner* (mitra kerja yang produktif), serta dukungan masyarakat yang baik agar menjadi dorongan terbentuknya program-program kreatif dan *smart people*. Dalam upaya melancarkan program *Smart City*, Pemerintah Kota Makassar melakukan kerjasama internasional dengan pihak *International Enterprise (IE) Singapore*. Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika, Joaquin Monserrate mengatakan bahwa Makassar sebagai *Smart City* merupakan sebuah langkah maju untuk meneruskan pembangunan yang berkelanjutan.

Seperti halnya dengan kerjasama *Smart City* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore*. Menurut hipotesa penulis, dengan adanya kerjasama tersebut maka penerapan strategi yang digunakan dapat meningkatkan

keuntungan dan Hubungan Internasional yang semakin baik antara kedua belah pihak yang saling bekerjasama.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif eksplanatif.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Data sekunder, disini penulis memperoleh data dari penelusuran online seperti buku elektronik, e-journal, artikel, berita online, dan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang terkait.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan bersamaan dengan masa darurat wabah Covid-19, sehingga timbul keterbatasan dalam melakukan studi literatur yang berbasis kajian kepustakaan dengan turun langsung ke lapangan atau melakukan riset melalui tindakan langsung, maka penulis hanya dapat memperoleh dan melaksanakan studi literatur menggunakan metode Penelitian Online (Online Research) yang dilakukan dengan cara membaca dan mencari buku elektronik, jurnal elektronik, dan atau literatur yang sudah ada di internet untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tema penulisan tugas akhir ini.

### **4. Teknik Analisis Data**

- Analisis Kualitatif

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dimana analisa data ditekankan pada data-data non matematis. Dan analisa dilakukan terhadap persepsi otoritas terkait dalam artikel, berita online, dan atau kutipan-kutipan lain dari sumber yang berkaitan.

## F. Rancangan Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan terbagi dalam 5 (lima) bab, dengan rincian sebagai berikut;

- Pada bab satu, penulis memaparkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika pembahasan;
- Bab dua, penulis menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang berisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini;
- Bab tiga, penulis akan membahas mengenai gambaran umum kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan International Enterprise (IE) Singapore dalam upaya pembangunan Kota Makassar menuju Smart City;
- Bab empat, penulis akan memaparkan mengenai pembahasan dari strategi kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan International Enterprise (IE) Singapore dalam upaya pembangunan Kota Makassar menuju Smart City.
- Bab lima, akan terdiri dari keseluruhan pembahasan yang dilakukan sepanjang penelitian dan ditutup dengan kesimpulan yang juga akan dilampirkan pada bab ini.

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA

Pembangunan berbasis *Smart City* dapat memberikan inovasi yang begitu luas dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota, pelaku bisnis, individu, serta berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Visi Kota Makassar sendiri yaitu Makassar Kota Dunia yang nyaman untuk semua, dimana dari potensi tersebut kemudian dapat menjadikan Kota Makassar sebagai kota yang sejajar dengan kota-kota yang ada di dunia, dengan harapan dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi, usaha kreatif, maupun sektor pendukung lainnya.

Kota Makassar merupakan Kota terbesar di Indonesia Timur, jika dilihat dari aspek pembangunan dan infrastruktur, Kota Makassar tergolong sebagai salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia. Melihat berbagai potensi yang dimiliki serta padatnya jumlah penduduk yang mendorong perkembangan dan kemajuan kota, maka Pemerintah Kota Makassar mengembangkan strategi berupa suatu kerjasama berbasis Paradiplomasi *Smart City* yang dijalin dengan *International Enterprise (IE) Singapore*.

Untuk dapat menjelaskan strategi kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam upaya pengembangan kota, peneliti menggunakan konsep Paradiplomasi dan konsep *Smart City* yang saling berhubungan dengan strategi pemerintah sebagai upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*.

#### A. Paradiplomasi

Konsep Paradiplomasi mengacu pada kerjasama antara negara sub-nasional yang terlibat dalam hubungan internasional. Paradiplomasi secara umum masih merupakan fenomena baru bagi aktivitas pemerintahan, khususnya di Indonesia. Paradiplomasi mengacu kepada perilaku dan kapasitas untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub-state*, atau Pemerintah Regional (Pemerintah Daerah) dalam rangka kepentingan mereka masing-masing secara spesifik. Kerjasama oleh daerah otonom jika

dilihat dari sudut pandang Studi Hubungan Internasional secara teoritis merupakan hubungan yang tidak lagi bersifat *state-centric*, dimana aktor-aktor non-pemerintah bisa dengan leluasa melakukan jalan pintas kerjasama tanpa melibatkan Pemerintah Pusat lagi.

Ditinjau dari berbagai macam pendapat yang dikemukakan oleh berbagai ilmuwan dunia, paradiplomasi kemudian dapat dijelaskan dalam pendapat para ahli sebagai berikut;

- Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer, istilah Paradiplomasi ini pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos pada tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah antara *Parallel Diplomacy* menjadi *Paradiplomacy* yang mengacu pada makna *The Foreign Policy of Non-central Governments*.
- Menurut Ivo Duchacek, New York, tahun 1990, makna diplomasi pada konsep ini yaitu *Micro-Diplomacy*.
- Rohan Butler, seorang Ilmuwan Eropajuga juga mendefinisikan paradiplomasi sebagai;

*“the highest level of personal and parallel diplomacy, complementing or competing with regular foreign policy as the minister concerns, is thus a recurrent temptation to the chief of the executive, be he a premier or president”.*

- Menurut Cornago (2013),  
*“paradiplomacy is a “vibrant” object of study yet remains “peripheral” as it seems to have less attention in the mainstream discourse on diplomacy”.*

Menurutnya, terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kurangnya perhatian terhadap paradiplomasi dewasa ini, yaitu

1. *The prevailing state-oriented paradigm in viewing the international politics,*

2. *The ambiguous nature on how to rigidly define the “subnational entities” as there are myriads of political entities which are subordinates of the current nation-states, yet having different degrees of autonomy and level of governance.*

- Soldatos, tahun 1990, mendefinisikan paradiplomasi sebagai realitas global dunia kontemporer yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Secara fungsional dan berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, Soldatos membagi paradiplomasi dalam dua tipe, yaitu;

1. *Global Paradiplomacy*

Dalam tipe ini, pemerintah sub-nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaan yang diambil oleh Gubernur New York dan Gubernur New Jersey yang melarang pendaratan pesawat-pesawat Uni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Mengingat pemerintah sub-nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah. Tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi.

2. *Regional Paradiplomacy*

Dalam tipe ini, pemerintah sub-nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung (*geographical contiguity*), Soldatos menyebutnya sebagai *macroregional paradiplomacy*, sebaliknya, bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung, maka disebutnya sebagai *microregional paradiplomacy*. Pada umumnya, *regional paradiplomacy* ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarang menimbulkan kontroversi.

Kerjasama berbasis paradiplomasi turut berkembang seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, globalisasi hadir mengisi setiap kehidupan seperti politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Suatu jalinan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak asing tidak

luput dari kesadaran penuh bahwa tanpa adanya kerjasama maka pertumbuhan dan pengembangan suatu daerah akan sulit didorong untuk berkembang dengan lebih cepat. Hal tersebut dilandasi oleh Undang-Undang yang memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama luar negeri terdapat dalam pasal 42 ayat (1), bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama asing yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Salah satu bentuk paradiplomasi adalah suatu kerjasama dari satu negara yang berasal dari negara lain melalui perusahaan-perusahaan multinasional yang dimiliki oleh pihak swasta (Todaro, 2000:250). Salah satu bentuk kerjasama berbasis paradiplomasi yang kerap terjalin yaitu berupa bantuan modal asing ke dalam aktifitas perekonomian negara lain. Kerjasama ini biasanya berbentuk fisik, misalnya pembangunan perencanaan kota dan lain sebagainya.

Berbagai macam hal yang berkaitan dengan paradiplomasi juga memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan otonomi daerah, dimana dalam proses pengelolaan kerjasama, para aktor yang terlibat akan berhadapan langsung dengan kebijakan yang ada di daerah tersebut, sehingga akan berdampak positif bagi proses pembangunan yang berkelanjutan. Umumnya, kebanyakan aktor asing adalah perusahaan multinasional (MNC).

Sasaran kerjasama berbasis paradiplomasi di Indonesia pada umumnya diarahkan pada beberapa sektor kehidupan, misalnya kerjasama dalam bidang industri, pertambangan, teknologi dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan dukungan dari besarnya potensi Sumber Daya Alam yang dalam hal ini dimiliki oleh Kota Makassar, maka hal tersebut dapat menarik minat para aktor luar untuk melakukan kerjasama. Paradiplomasi kini sudah merambah ke berbagai daerah yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang sangat potensial. Setiap Pemerintah Daerah mulai berperan aktif dalam memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan pembangunan kota.

Dapat dikatakan bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan oleh negara atau aktor *sub-state* dalam kerangka paradiplomasi sangat berpeluang besar dalam pengembangan dan kemajuan kota. Melalui pengelolaan secara bersama antara Pemerintah Daerah sebagai penyedia Sumber Daya Alam, dan negara lain atau lembaga asing sebagai penyedia modal dan teknologi, maka kemajuan pembangunan kota akan semakin meningkat. Dengan itu, kerjasama berbasis paradiplomasi ini merupakan wujud hubungan timbal balik antara Pemerintah Kota dengan pihak asing dalam implementasi pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*.

## **B. Smart City**

Menurut Nukma (2016), *Smart City* merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan dengan mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi. Kemudian menurut Suhono dalam (Nukma, 2016), *Smart City* merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung pembangunan yang berbasis *Smart City*. *Smart City* juga dapat didefinisikan sebagai suatu konsep penataan kota yang terintegrasi dalam semua aspek, baik dari pemerintahan, penduduk, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi dengan menjadikan perkembangan teknologi sebagai salah satu perangnya.

Caragliu, A. dalam (Nukma, 2016) mendefinisikan *Smart City* sebagai kota yang mampu menggunakan Sumber Daya Manusia, modal sosial dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Dijelaskan bahwa *Smart City* menggunakan teknologi digital untuk

meningkatkan kinerja dan kesejahteraan, untuk mengurangi biaya dan konsumsi sumber daya, dan untuk terlibat lebih efektif dan aktif dengan masyarakat.

Tujuan dari adanya *Smart City* adalah guna membentuk suatu kota yang aman dan nyaman bagi masyarakatnya, serta dapat memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan dari *Smart City* adalah untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial (keamanan), ekonomi (daya saing) dan lingkungan (kenyamanan). Pada intinya konsep *Smart City* adalah bagaimana cara menghubungkan antara infrastruktur fisik, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi dengan menggunakan teknologi yang dapat mengintegrasikan semua elemen dalam aspek tersebut, dan membuat kota lebih efisien dan layak huni.

### **1. Indikator Smart City**

Menurut Nukma (2016), indikator yang mendukung terciptanya *Smart City and Society Innovation Centre* dari Institut Teknologi Bandung mendefinisikan kota cerdas dalam 6 komponen, yaitu;

1. Infrastruktur Fisik (*Hard Infrastructure*), berupa lahan dan bangunan, transportasi dan jaringan utilitas, serta TIK.
2. Sistem Kota, yang dibagi atas aktivitas yang dilakukan untuk mengelola kota berupa sistem pemerintahan, pendidikan, transportasi, kesehatan, energi, keamanan, lingkungan, sosial, keuangan, dan perniagaan.
3. *Soft Infrastructure*, yaitu manusia dan institusi yang mengelola infrastruktur fisik, regulasi serta kehidupan sosial di perkotaan, berupa kepemimpinan, tata kelola, serta forum inovasi.
4. Ekosistem, berupa ekosistem publik, ekosistem usaha swasta, ekosistem komunitas serta ekosistem pihak ke 4.

5. *Stakeholder*, yaitu orang atau organisasi yang mempunyai kepedulian, memiliki kepentingan, atau terlibat dalam beberapa permasalahan di perkotaan, dan
6. Tujuan yang ingin dicapai dari penerapan Smart City.

Sementara Adiar Ersti Mardisiwi dalam festagama 2015, PWK-UGM berjudul “Mari Mengetahui Konsep *Smart City*” membagi *Smart City* ke dalam 6 indikator utama, yaitu;

1. *Smart People*, yang berarti penduduk kota yang dapat dikatakan *smart*, tidak hanya mengacu pada kualifikasi edukasi seseorang, tetapi juga mengenai kualitas interaksi sosial yang terbentuk. Karena pembangunan senantiasa membutuhkan modal, baik modal ekonomi, modal manusia, maupun modal sosial.
2. *Smart Environment*, merupakan salah satu aspek smart city yang membahas kemajuan teknologi serta penggunaannya untuk melindungi dan memelihara lingkungan kota baik keamanan maupun alam.
3. *Smart Living*, yaitu rasa nyaman yang dapat diperoleh masyarakat dengan adanya beberapa indikator dalam sebuah kota seperti kesehatan, perumahan, aksesibilitas, persampahan, energi, keanekaragaman hayati, air, teknologi, dan transportasi.
4. *Smart Mobility*, yaitu kemampuan kota dalam memberikan kesempatan akses yang seluas-luasnya dengan cakupan lokal maupun internasional. *Smart mobility* termasuk pada transportasi dan pembangunan infrastruktur yang diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota, dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
5. *Smart Economy*, dalam kehidupan kota, mengacu pada industri yang *smart* yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa. Pada aspek *smart economy*, kota haruslah ditopang oleh kegiatan perekonomian yang sangat baik serta dapat

meningkat setiap tahunnya. Kegiatan ekonomi itu sendiri dapat berjalan dengan baik jika tata kota dan infrastruktur disiapkan oleh pemerintah kota dengan berkualitas dan terhindar dari tangan-tangan vandalisme.

6. *Smart Governance* (pemberdayaan dan partisipasi), yang berkaitan dengan politik dan partisipasi masyarakat, layanan penduduk dan penggunaan jaringan komunikasi baru seperti *e-government* dan *e-democracy*. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah *good governance*. Yaitu paradigma, sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan berdaya saing.

## 2. Unsur dan Faktor-Faktor Smart City

Menurut Nukma (2016), *Smart City* pada intinya mencakup keseluruhan teknologi digital yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan. Dengan begitu, *Smart City* mempunyai unsur dan faktor-faktor yang menjadi bagian yang terpisahkan. Adapun unsur-unsur dari *Smart City* yang dikemukakan oleh Nukma (2016) yaitu;

- Teknologi dan sumber daya (alam, manusia, buatan),
- Efisien dan efektif,
- Pintar,
- Jaringan,
- Berkelanjutan, kompetitif dan partisipatif.

Selain unsur-unsur *Smart City*, juga disebutkan adanya faktor *Smart City*, meliputi;

- Mendorong dan mengembangkan pola baru struktur kepemimpinan,

- Bekerjasama dengan melibatkan semua pihak,
- Membangun dan menggunakan infrastruktur pintar,
- Mempersiapkan model pembiayaan yang mampu menjawab tantangan dan peluang ke depan,
- Model pembiayaan.

Menurut Nukma (2016), secara lebih rinci konsep *Smart City* dapat disebutkan dalam rumusan seperti berikut;

- Sebuah kota berkinerja baik dengan berpandangan ke dalam ekonomi, penduduk, pemerintahan, mobilitas dan lingkungan hidup,
- Sebuah kota yang mengontrol dan mengintegrasikan semua infrastruktur termasuk jalan, jembatan, terowongan, rel, kereta, bandara, pelabuhan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung. Dengan begitu dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, serta merencanakan pencegahannya. Kegiatan pemeliharaan dan keamanan dipercayakan kepada penduduknya,
- *Smart city* dapat menghubungkan antara infrastruktur fisik, infrastruktur IT, infrastruktur sosial, dan bisnis infrastruktur untuk meningkatkan kecerdasan kota,
- *Smart city* membuat kota lebih efisien dan efektif serta layak huni,
- Penggunaan *Smart Computing* untuk membuat *Smart City* dan fasilitasnya meliputi pendidikan, kesehatan, keselamatan umum, transportasi yang lebih cerdas, saling berhubungan dan efisien.

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **A. Kota Makassar dan Smart City**

Kota Makassar merupakan Ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kota yang dulunya bernama Kotamadya Ujung Pandang kini merupakan salah satu kota metropolitan dan tergolong pula sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia dari aspek pembangunannya, dan secara demografis dengan berbagai suku bangsa yang menetap di Kota Makassar. Adapun suku yang menetap di kota ini yakni suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Jawa serta Tionghoa.

Wilayah Kota Makassar terus berkembang, khususnya ke arah Timur, pembangunan infrastruktur seperti perluasan pelabuhan laut Makassar, Bandara Hasanuddin, jalan tol, kawasan industri Makassar dan berbagai proyek lainnya tengah dilaksanakan. Kota Makassar juga memiliki obyek-obyek wisata yang cukup menarik seperti Benteng Ujung Pandang, pelabuhan perahu tradisional pinisi, makam Pangeran Diponegoro, makam Sultan Hasanuddin, Taman Budaya Sulawesi, Rekreasi Wisata Bahari, pagelaran tarian dan busana tradisional.

Kota Makassar yang juga dikenal dengan sebutan Kota Anging Mammiri memiliki luas wilayah 175,77 km<sup>2</sup> yang secara administratif terbagi dalam 14 kecamatan dan 143 kelurahan dengan jumlah penduduk 1.371.904 jiwa. Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan yang secara geografis berada di tengah-tengah kepulauan nusantara atau *Center Point of Indonesia* dan memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan, pusat industri, distribusi barang/jasa, dan ruang keluarga atau "*living room*" Kawasan Timur Indonesia.

Sebuah kota merupakan tempat huni dan dasar kehidupan seluruh masyarakat yang menempatinya. Di era modern seperti saat ini, kebutuhan kota untuk saling terintegrasi dan ramah teknologi semakin terasa dalam kehidupan masyarakat perkotaan dan kabupaten di Indonesia, mulai dari pendidikan, kesehatan, konsumsi energi, transportasi, penataan kota, hingga keamanan publik menjadi tantangan untuk terwujudnya pertumbuhan sebuah kota yang mampu memberikan kenyamanan bagi masyarakatnya.

Tantangan lain yang perlu dihadapi adalah tingginya arus urbanisasi dan angka pertumbuhan penduduk di sebuah kota maupun kabupaten, sehingga perlunya pengelolaan tata kota yang sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Hal tersebut mendorong setiap kota untuk menggunakan konsep *Smart City* sebagai strategi pembangunan demi kemajuan kota. Smart city merupakan implementasi dan solusi terhadap permasalahan sumber daya di suatu kota, agar menjadi lebih aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan (*sustainable*). Proses perubahan tersebut dengan jelas membutuhkan komitmen dan dukungan penuh dari Pemerintah Kota.

Perkembangan kota yang semakin mengkhawatirkan akibat dari penambahan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan dengan baik dan cepat. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan matang, sejatinya dapat dimaksimalkan untuk menstimulasi Kota Makassar dalam mencari berbagai metode mutakhir guna memecahkan masalah utama pembiayaan teknologi informasi dan perbaikan infrastruktur. Tentu saja, inisiatif dari pemerintah menjadi sebuah keharusan untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dalam mengambil langkah-langkah strategis guna mengintegrasikan jaringan teknologi cerdas untuk menciptakan *Makassar Smart City*. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk bisa melakukan inovasi, kreasi serta improvisasi dalam menggali potensi sumber dayanya untuk pembangunan Kota Makassar itu sendiri.

Kota Makassar sebagai *Smart City* menjadi salah satu bagian dari program pemerintah kota. Program ini tidaklah berjalan sendiri, harus disandingkan dengan konsep kearifan lokal Makassar, seperti program Sombere (keramahan). Dengan semangat sombere, maka interaksi antara pemerintah dengan masyarakat akan semakin erat, terbangun kebersamaan, semakin responsif, tingkat improvisasinya lebih tinggi, inisiatif dan keinginan menyelesaikan masalah sesegera mungkin, solutif, inovatif, semakin terbuka untuk melakukan perubahan, pelayanan yang mampu menggabungkan antara *gesture* (bahasa tubuh) dan lisan yang mencerminkan kecerdasan, keluhuran pekerti dan tata krama yang tinggi. Dengan demikian merekatkan antara sombere (*attitude*) dengan pelayanan publik merupakan inovasi baru dan cara pandang baru dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

Filosofi dari *Smart City* itu sendiri adalah perubahan pola pikir masyarakat dari konvensional menuju main seat digital. Ada tantangan besar yang akan dihadapi, yaitu mengubah perilaku masyarakat konvensional menjadi masyarakat melek teknologi. Jika Makassar menjadi *Smart City*, maka masyarakat harus akrab dengan inovasi, seperti terbiasa menggunakan layanan kesehatan digital, sampai pelayanan birokrasi media sosial. Teknologi inilah yang dapat membangun kultur, jadi pola pikir tidak terbalik kultur duluan, akan tetapi perangkat teknologi lah yang akan membangun kultur baru, karakter dan sebagainya.

Kota Makassar sebagai Ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan tingkat pertumbuhan perkotaan yang cukup pesat mengakibatkan kota menghadapi berbagai tantangan baru yang perlu diatasi, sehingga membuat pemerintah melakukan berbagai inovasi sebagai bentuk mengintegrasikan beragam pelayanan kepada masyarakat dengan melalui program *Smart City*. *Smart City* dapat dikatakan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan transparan. *Smart City* merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien

untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. *Smart City* tersusun dari komponen-komponen dimensi pendukung, diantaranya yakni; *Smart economy, Smart people, Smart governance, Smart government, Smart mobility, Smart environment dan Smart living*. *Smart City* juga dapat didefinisikan sebagai sebuah konsep penataan kota yang terintegrasi dalam semua aspek, baik dari pemerintahan, penduduk, kesehatan, pendidikan dan masih banyak lagi dengan menjadikan perkembangan teknologi sebagai salah satu perangkatnya. *Smart City* disini merupakan agenda prioritas Pemerintah Kota Makassar sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai permasalahan Kota Makassar yang semakin mengkhawatirkan. Melalui *Smart City* tujuan-tujuan dari pembangunan Kota Makassar yang berkelanjutan dapat dicapai secara sistematis.

## **B. International Enterprise (IE) Singapore**

*International Enterprise (IE) Singapore* merupakan suatu lembaga negara Singapura yang didirikan pada tahun 1983. *International Enterprise (IE) Singapore* merupakan penyedia perdagangan luar negeri dan pertumbuhan internasional di Singapura. Lembaga ini menyediakan pembiayaan, bisnis, elektronik dan teknik presisi, lingkungan, teknologi komunikasi informasi, infrastruktur, ritel dan gaya hidup, serta layanan transportasi dan logistik. *International Enterprise (IE) Singapore* ini juga memperjuangkan pengembangan dan inovasi pembangunan negara maupun kota yang berbasis internasional, bukan hanya dalam lingkup nasional negara Singapura saja. Pemerintah negara Singapura menjalankan kesepakatan dengan *SPRING (Standards, Productivity and Innovation Board) Singapore* pada tanggal 1 April 2018, sebagai satu agensi yang kemudian menyempurnakan pembentukan lembaga *International Enterprise (IE) Singapore* ini. *International Enterprise (IE) Singapore* mempromosikan perdagangan internasional dan membantu perusahaan-perusahaan Singapura untuk berkembang secara internasional.

*International Enterprise (IE) Singapore* berawal dari reorganisasi yang dulu disebut dengan *Singapore Trade Development Board (TDB)*. TDB dibentuk pada tahun 1983 untuk mengembangkan Singapura sebagai pusat perdagangan internasional, mempromosikan barang dan jasa negara. Kegiatan yang dilakukan berupa penyediaan fasilitas perdagangan dasar, hingga meninjau kebijakan, strategi, dan teknik pemasaran. Hal tersebut kemudian mengeksplorasi peluang di pasar tradisional dan non-tradisional, dan kemudian mengeksplor sistem bisnis dan mengembangkan perdagangan internasional. *International Enterprise (IE) Singapore* juga berperan dalam kebijakan perdagangan setelah Singapura bergabung dengan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, untuk secara aktif mengamankan akses pasar dan melobi perdagangan bebas.

*Re-branding* bertepatan dengan pengakuan bahwa Singapura harus bergerak melampaui bidang ekspor yang didominasi oleh investasi bidang elektronik, dan untuk mendiversifikasi sumber pertumbuhannya. Salah satu dorongan utama dalam strategi ekonomi baru Singapura adalah membantu perusahaan-perusahaan yang berbasis di Singapura untuk dan tumbuh di pasar global. TDB kemudian berganti nama menjadi *International Enterprise (IE) Singapore* pada tanggal 12 April 2002 untuk menandai perubahan strategis dalam kegiatannya, yang kemudian berinovasi dari promosi ekspor menjadi lebih fokus pada pengembangan bisnis Singapura yang memulai dan mengembangkan bisnis mereka di luar negeri.

Dengan cara tersebut, *International Enterprise (IE) Singapore* dianalogikan sebagai agen promosi perdagangan dan ekspor lainnya, seperti Komisi Perdagangan Australia (*Austrade*) dan Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang. Namun, peran mereka berbeda untuk mencerminkan strategi ekonomi yang berbeda juga, yang dijalankan oleh pemerintah masing-masing, yang juga bergantung pada profil dan orientasi relatif ekonomi mereka.

*International Enterprise (IE) Singapore* mendukung perusahaan dari semua ukuran dan tahap pengembangan, termasuk perusahaan rintisan, UKM, dan perusahaan besar. Untuk startup, *International Enterprise (IE) Singapore* bermitra dengan para investor, dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan ekosistem startup di Singapura melalui berbagai program yang dikelola oleh Startup Singapura sendiri. Untuk UKM, *International Enterprise (IE) Singapore* memberikan bantuan dalam meningkatkan kemampuan bisnis melalui berbagai hibah dan program, serta akses ke teknologi dan lembaga penelitian. *International Enterprise (IE) Singapore* juga mendukung UKM yang berekspansi ke luar negeri melalui pemotongan pajak, dana hibah, dan lebih dari 22 Perjanjian Perdagangan Bebas. Perusahaan-perusahaan besar pun menerima bantuan dari *International Enterprise (IE) Singapore* dalam memperluas jangkauan pasar global mereka dan mencari peluang baru.

### **C. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan IE Singapore**

Pada November 2016, Pemerintah Kota Makassar bersama dengan *International Enterprise (IE) Singapore* resmi menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*), mengenai kerjasama internasional berbasis paradiplomasi yang dijalankan sebagai upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*. *International Enterprise (IE) Singapore* merupakan lembaga pemerintah yang bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Singapura untuk pengembangan *Smart City* Makassar. Pemerintah Kota Makassar melakukan kerjasama dengan pihak *International Enterprise (IE) Singapore* melalui instansi terkait yang ditunjuk oleh Singapura dan pihak swasta.

Tepat pada hari Senin, 14 November 2016, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, atau yang kerap disapa Danny Pomanto, menandatangani MoU (*Memorandum of Understanding*) *Concerning Cooperation* bersama dengan *International Enterprise (IE) Singapore*, bertempat di Wisma Perdamaian, Jalan Imam Bonjol No. 209, Pendrikan Lor, Semarang. Penandatanganan MoU antara Wali Kota Danny Pomanto dan

*Assistant CEO* Tan Soon Kim disaksikan oleh Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean dan para menteri Indonesia dan Singapura, di antaranya Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto. Hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Sementara dari pihak Singapura sendiri hadir Menteri Perdagangan Lim Hng Kian, Menteri Perindustrian S Iswaran, Menteri Komunikasi dan Informasi Yaa Ibrahim, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen, Menteri Luar Negeri Vivian Balakhrisnan, dan Menteri Pendidikan Ong Ye Kung. Dengan kerjasama internasional yang telah diprogramkan, Wali Kota Danny akhirnya melakukan penandatanganan pada lembar MoU yang menandakan kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar bersama dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City*.

Adanya MoU antara Pemerintah kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* membuka peluang kerjasama bagi keduanya untuk pengelolaan perkotaan, yang dimana poin-poin kerjasamanya meliputi;

- Pengelolaan perkotaan yang meliputi; Pengembangan Program deteksi dini dan pengendalian banjir, dan pengembangan sistem saluran drainase terpadu,
- Bidang Transportasi yang meliputi; Penyusunan *Grand Desain Traffic Light* (ATCS/ITS) Kota Makassar, dan Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal yang pintar,
- Bidang Pendidikan yang meliputi; Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Data Centre Pendidikan dan jaringan IT pendidikan,

- Bidang Kesehatan yang meliputi; Jaringan *Telemedicine* Kota Makassar
- Bidang Lingkungan yang meliputi; Pengembangan sistem Pengelolaan pencemaran tanah, air, udara, dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan dan sistem analisis dampak lingkungan,
- Bidang Pariwisata yang meliputi; Pengembangan sistem pariwisata terpadu dan penyusunan *Master Plan* kawasan wisata,
- Bidang Ekonomi dan e-Pemerintahan yang meliputi; Program administrasi e-Pemerintahan di Kantor Pemerintahan,
- Bidang Infrastruktur yang meliputi: Fasilitasi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi sistem yang cerdas, keterpaduan pemanfaatan, dan penataan ruang wilayah.

Dikatakan oleh Wali Kota Danny Pomanto, pada pertemuan kali itu, Kota Makassar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang menandatangani MoU dengan Singapura. Dengan ditetapkannya kesepakatan tersebut maka diharapkan kerjasama dalam beberapa bidang di atas yang secara global merupakan program *Smart City*, dapat mempermudah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kota Makassar.

Terdapat sejumlah sektor yang merupakan bentuk persetujuan kerjasama dalam MoU Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore*, meliputi; pengelolaan perkotaan, transportasi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pariwisata, ekonomi hingga infrastruktur. Pihak *International Enterprise (IE) Singapore* juga mengikutsertakan sejumlah korporasi yang berbasis di Singapura untuk memetakan sejumlah sektor yang potensial. Terdapat sejumlah program Pemerintah Kota yang ditawarkan kepada *International Enterprise (IE) Singapore* untuk dikembangkan, yakni uji coba 2.000 titik lampu jalan, *smart parking*, *solar shell (floating solar)*, serta *e-government*.

Kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* yang berbasis *Smart City* terbagi dalam sejumlah sektor utama, yaitu;

- Pengelolaan perkotaan yang meliputi pengembangan program deteksi dini dan pengendalian banjir, serta pengembangan sistem saluran drainase,
- Bidang transportasi, yang meliputi penyusunan *grand desain traffic light* Kota Makassar dan penyusunan tatanan transportasi lokal yang pintar,
- Bidang pendidikan, yaitu komitmen bekerjasama dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem pusat data pendidikan dan jaringan IT pendidikan,
- Bidang kesehatan. Pihak *International Enterprise (IE) Singapore* siap mendukung Makassar dalam jaringan *telemedicine*, serta pengembangan sistem pengelolaan pencemaran tanah, air, udara dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan,
- Bidang pariwisata juga menjadi salah satu poin kerjasama dalam MoU kedua belah pihak, yang memungkinkan Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* berkolaborasi dalam pengembangan sistem pariwisata terpadu dan penyusunan master plan kawasan wisata,
- Sektor administrasi pemerintahan juga akan menjadi bagian dari sinergi Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* yang meliputi *e-Government*, kemudian peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dan fasilitasi sistem yang cerdas keterpaduan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah.

Kota Makassar mendapat perhatian serius dari pemerintah dan perusahaan besar Singapura. Hal tersebut nampak saat pertemuan yang membahas mengenai kerjasama Makassar-Singapura antara Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto bersama

Senior Menteri Luar Negeri Singapura. Pertemuan yang dikemas dalam *Business Meeting with Afternoon Tea* itu mendiskusikan bersama mengenai strategi kerjasama antara Singapura dan Makassar. Diskusi yang melibatkan para pemangku kepentingan juga membicarakan mengenai potensi pengembangan provinsi dan kota, dalam hal ini Kota Makassar dengan menakar peluang kerjasama yang menjanjikan bagi pemerintah.

Program *Smart City* terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu;

- *Smart Economy*

Ekonomi merupakan salah satu pilar penopang negara, kota, maupun daerah. Pengelolaan ekonomi suatu negara, kota, maupun daerah hendaknya perlu dilakukan dengan lebih baik dan terkomputerisasi. Ekonomi tidak hanya berkaitan dengan barang dan jasa yang disediakan, tetapi juga inovasi, kemampuan bersaing, pendidikan dan kewirausahaan. Salah satu hal yang ingin diterapkan pada implementasi *Smart City* adalah *Smart Economy*. Hal ini disebabkan dengan jumlah penduduk yang besar dan potensi yang dimiliki berupa SDA dan SDM, maka apabila dikelola dengan baik, ekonomi akan meningkat pesat. Implementasi dan penilaian *Smart City* pada dimensi *Smart Economy* meliputi dua hal; yaitu proses inovasi, dan kemampuan daya saing. Kedua hal tersebut berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar.

- *Smart People*

*Smart People* dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi di dalam mewujudkan *Smart City*. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreatifitas pada diri manusia dan modal sosial. Beberapa kriteria penilaian tersebut antara lain;

- a. Adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasiskan IT,

- b. Adanya komunitas IT dan komunitas lain terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan wadah kreatifitas masyarakat,
- c. Adanya peran serta aktif masyarakat di dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik memanfaatkan teknologi informasi.

Modal sosial dalam bentuk kewirausahaan, implementasi teknologi di masyarakat, penghapusan *digital divide* (kesenjangan digital) dan *knowledge divide* (kesenjangan pengetahuan), yang berdampak kepada peningkatan kualitas SDM, kualitas hidup, dan pendapatan masyarakat. Dengan adanya *Smart People*, diharapkan dapat tercipta komunitas masyarakat yang *smart*. Kondisi *smart* ini dapat diperoleh melalui sejumlah pembelajaran yang dilakukan secara berkelanjutan. Apabila kondisi masyarakat telah menjadi *smart*, maka pondasi untuk mewujudkan *Smart City* akan tercapai. Bentuk terapan *Smart City* pada satu atau beberapa bidang kehidupan pada kota yang bersangkutan akan berhasil dengan adanya partisipasi masyarakat setempat yang *smart*, sehingga mampu mengetahui manfaat yang akan diperoleh dan bagaimana mengelola serta mengembangkan *Smart City* tersebut untuk menciptakan tatanan kehidupan dan kualitas layanan publik yang lebih baik.

- *Smart Government*

*Smart Government* merupakan bagian atau dimensi yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. *Smart Government* meliputi segala syarat, kriteria dan tujuan untuk proses pemberdayaan dan partisipasi dari masyarakat dan pemerintah secara bersama-sama. Adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan berdemokrasi serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. *Smart Government* terdiri atas tiga bagian; yang pertama keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online; kedua peningkatan jumlah dan kualitas layanan public; ketiga adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas. Melalui *Smart*

*Government* ini, diharapkan tatanan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, melalui keharmonisan hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta proses pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan, dengan memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, masyarakat akan melek terhadap teknologi dan pemerintahan, sehingga semua langkah kebijakan dapat benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat.

- *Smart Mobility*

*Smart mobility* merupakan bagian atau dimensi pada *Smart City* yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada *Smart Mobility* ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang *smart*, sehingga diharapkan terciptanya layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik, serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi dan lain-lain. Terdapat beberapa kriteria di dalam *Smart Mobility* yang umumnya diimplementasikan ke dalam *ITS (Intelligence Transport System)*.

- *Smart Environment*

*Smart Environment* merupakan bagian atau dimensi pada *Smart City* yang mengkhususkan kepada bagaimana lingkungan yang pintar. Kriteria penilaian disini mencakup proses kelangsungan dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Untuk mewujudkan *Smart Environment*, perlu adanya terapan aplikasi dan komputer dalam bentuk *Sensor Network* dan *Wireless Sensor Network*, jaringan komputer, kecerdasan buatan, database sistem, *mobile computing*, sistem operasi, *parallel computing*, *recognition*. *Smart Environment* dibedakan menjadi tiga bagian macam yaitu; *Virtual Computing Environment*, *Physical Environment*, dan *Human environment*.

- *Smart Living*

Pada *Smart Living* terdapat syarat, kriteria, dan tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Untuk mewujudkan *Smart Living*, terdapat tiga bagian yang harus dipenuhi, antara lain;

- 1) Fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi,
- 2) Penyediaan sarana, prasarana, dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif, memanfaatkan teknologi informasi,
- 3) Infrastruktur teknologi informasi yang memadai, sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi.

Program *Smart City* sudah mulai beroperasi di Kota Makassar. Dengan mengoptimalkan penggunaan sistem teknologi informasi pada sistem Pemerintahan Kota Makassar diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang efektif, efisien serta transparan.

Untuk dapat mengatasi persoalan yang ada di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar mengupayakan berbagai inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah sudah melakukan beberapa inovasi dalam rangka mewujudkan *Makassar Smart City*, yaitu;

a. *Operation Room* melalui CCTV

*Operation room* ini digunakan sebagai pusat informasi data, pusat informasi kota, dan pusat pemantauan.

*War Room (commons room)* yang menghubungkan kamera CCTV milik Pemerintah Kota Makassar yang tersebar di berbagai titik pada layar monitor, sistem

*war room* ini agar potensi Kota Makassar bisa terpantau secara real time melalui sistem big data yang dibangun. Penggunaan kamera pengintai atau CCTV sekarang ini tidak hanya digunakan di bidang keamanan, seperti kepolisian dan militer untuk mengintai gerak gerik objek yang dikhususkan. Tertanamnya IP (internet protokol) dan sensor pada video kamera menyebabkan aplikasi pemanfaatan CCTV terus berkembang luas di berbagai bidang seperti bidang perhubungan, kebencanaan, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Dalam bidang pemerintahan, data rekaman CCTV dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja, kedisiplinan pegawai, pemantauan potensi pendapatan dari pajak bangunan dan reklame, pemantauan daerah rawan bencana sosial, pemantauan pembangunan infrastruktur dan bangunan, kinerja pelayanan publik, dan bahkan menjadi salah satu data penting dalam pengambilan keputusan, serta manfaat lain yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan.

b. Apartemen Lorong (aparong)

Pemerintah Kota Makassar menyediakan Apartemen Lorong (Aparong) yang merupakan bagian dari program Pemerintah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Aparong diperuntukkan bagi pekerja MBR dan masyarakat kurang mampu, memiliki lahan namun tidak memiliki anggaran untuk membangun. Inovasi tersebut adalah sebuah solusi untuk menangani masalah pemukiman kumuh di lorong-lorong dengan konsep dapat dibongkar pasang.

c. *Home Care*

Makassar *Home Care* yang lebih dikenal dengan istilah Dottoro' ta', yaitu sebuah layanan kesehatan berbasis teknologi yang ramah pada pasien karena memungkinkan dokter mengunjungi pasien di rumah-rumah.

Dalam upaya pengembangan Kota Makassar menuju *Smart City* dan Kota Dunia, Kota Makassar memiliki keunggulan komparatif, kompetitif, aksesibel dan inklusifitas yang berdaya tarik tinggi dan memukau dalam berbagai hal. Diantaranya potensi Sumber Daya Alam dan infrastruktur, serta sosial ekonomi yang menjanjikan terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan standar dunia. Pokok upaya tersebut dapat disebutkan sebagai terwujudnya masyarakat sejahtera dengan standar dunia.

Implementasi program yang dilaksanakan diharapkan dapat mendorong terwujudnya proses pembangunan yang semakin menyempitkan kesenjangan, kemudian melahirkan kemandirian secara stabil, dalam struktur dan pola ruang kota yang menjamin kenyamanan dan keamanan bagi berkembangnya masyarakat yang mengedepankan prinsip inklusifitas serta pola hubungan yang setara antara stakeholder dengan stakeowner dalam pembangunan kota, serta harapan-harapan akan proses perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan yang dapat dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat kota.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

Manajemen perkotaan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau proses pelaksanaan rencana kota guna mencapai sasaran pembangunan kota secara efisien dan efektif. Dalam proses maupun upaya yang dilakukan tentu juga menginginkan adanya optimalisasi pencapaian tujuan dengan melalui tahapan yang tepat dan dilakukan secara terpadu. Pada intinya, pengertian manajemen kota adalah suatu upaya pengelolaan pembangunan kota yang berkelanjutan yang dilakukan dengan sistem dan strategi yang terintegrasi, holistik dan komprehensif, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan rencana dan tahapan yang ditetapkan, dan pada akhirnya akan mensejahterakan masyarakat kota. Dalam hal ini, peran pemerintah sangatlah besar dalam manajemen suatu kota. Pemerintah berperan untuk mengkoordinasikan pihak-pihak yang terkait dan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi perkotaan.

Sistem kota berpengaruh terhadap terciptanya kota modern atau *Smart City*, karena dengan adanya penataan ruang kota *Smart City* di Kota Makassar, maka dapat berjalan dengan baik sesuai dengan konsep yang seharusnya, yang menyangkut masalah transportasi, pemerintahan, lingkungan sosial, kesehatan dan lain-lain.

*Smart city* merupakan strategi dalam upaya menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi oleh Kota Makassar karena tingginya angka pertumbuhan penduduk, disertai dengan tingginya tuntutan masyarakat, sehingga *Smart City* diajukan sebagai upaya ataupun solusi dalam menyelesaikan masalah yang ada di dalam kota.

Dalam membangun program *Smart City* pada sebuah kota, perlu melihat pokok persoalan yang timbul secara cermat dalam sebuah kota, sebab *Smart City* ini dimaksudkan

untuk memecahkan persoalan perkotaan yang kerap terjadi. Dengan kata lain sebuah kota harus mampu mengetahui sejak dini seperti apa kebutuhan masyarakatnya, sehingga senantiasa dapat memenuhi atau mengantisipasi keinginan publik melalui beragam inovasi yang dilakukan.

#### **A. Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam upaya pembangunan kota berbasis Smart City**

*Smart City* merupakan agenda global sebagai respon secara konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di seluruh dunia. Melalui *Smart City*, tujuan-tujuan dari pembangunan perkotaan berkelanjutan dapat dicapai secara sistematis dan bertahap dengan perspektif jangka panjang.

Pada November 2016, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto melakukan penandatanganan *MoU (Memorandum of Understanding)* dengan *International Enterprise (IE) Singapore*, yang bertepatan pada kegiatan *Leaders Retreat* Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Makassar menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang menandatangani *MoU* dengan pihak Singapura. Pemerintah Kota Makassar mengharapkan kerjasama berbasis *sub-state* atau yang disebut dengan paradiplomasi yang secara global menyangkut *Smart City* dapat bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

##### **a. Pemetaan kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan IE Singapore**

Pada tahun 2017, pengembangan tata kelola Kota Makassar berbasis *Smart City* memasuki pembahasan teknis berupa pemetaan program yang digarap bersama, dengan melibatkan lembaga *International Enterprise (IE) Singapore*. Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan bahwa tahapan tersebut merupakan tindak lanjut dari jalinan nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara

Pemerintah Kota Makassar dengan pihak *International Enterprise (IE) Singapore* yang dilakukan pada November 2016. Pada kesempatan tersebut, delegasi dari pihak *International Enterprise (IE) Singapore* tiba di Makassar, yang kemudian langsung melakukan mapping apa saja yang menjadi strategi bersama dalam pengelolaan kerjasama yang dijalankan oleh kedua belah pihak.

Pada pertemuan kali itu, disebutkan bahwa pihak *International Enterprise (IE) Singapore* mengikutsertakan sejumlah korporasi yang berbasis di Singapura untuk memetakan sejumlah sektor yang potensial. Gambaran strategi kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* terbagi dalam beberapa sektor utama berupa upaya pengelolaan perkotaan, penerapan kerjasama dalam bidang transportasi, bidang pendidikan, bidang kesehatan yang dimana pihak *International Enterprise (IE) Singapore* mendukung Makassar dalam jaringan *telemedicine*, bidang pariwisata juga menjadi salah satu strategi kerjasama kedua belah pihak.

#### **b. Pemerintah Kota Makassar Melakukan Inovasi**

Pemerintah Daerah melalui inovasi dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Bab XXI yang bertajuk Inovasi Daerah. Dari Pasal 386 hingga Pasal 390 UU 23/2014, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip; peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Membangun Kota Makassar dengan menerapkan konsep *smart city* memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi ke dalam satu kesatuan atau sistem, dengan satu tujuan pokok, yaitu melayani semua kebutuhan masyarakat dengan cepat, tepat, ramah dan memuaskan, dengan bertumpu pada pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal.

Pemanfaatan konsep manajemen strategi dalam membangun Kota Makassar menuju *Smart City* memberikan pedoman yang sangat jelas terhadap langkah-langkah strategisnya, sehingga segala sesuatunya akan teridentifikasi dengan jelas dan diharapkan tingkat keberhasilan yang sangat besar. Salah satu sasaran *Smart City* Kota Makassar adalah sasaran *Smart Governance* Kota Makassar, yakni tata kelola pemerintahan yang efisien, terintegrasi, berkinerja tinggi, bebas korupsi, inovatif, komunikatif melalui inovasi yang smart, terintegrasi dengan sistem jaringan data terpusat, platform one data, dan sistem keamanan yang berasuransi. *Smart Governance* diupayakan untuk dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yakni pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Strategi *Smart City* Kota Makassar yang meliputi tingkatan manajemen kota yang terintegrasi dan efisien dengan menggunakan ICT (*public servis*) yaitu;

- Terlaksananya pelayanan publik yang terintegrasi untuk mencapai layanan yang efektif, efisien, dan transparan,
- Disediaknya peningkatan pelayanan terpadu di kelurahan dan kecamatan,
- Pengembangan akses internet pada ruang publik,
- Aksesibilitas pelayanan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk bagi yang berkebutuhan khusus (difabel),

- Pengawasan serta pengamatan masyarakat melalui media sosial yang terkoneksi dengan unit layanan publik,
- Pembangunan infrastruktur dalam rangka mengintegrasikan seluruh layanan, baik melalui sistem online maupun melalui musrembang di setiap SKPD dalam perencanaan dan perumusan kebijakan,
- Pengembangan aplikasi *e-government* yang diarahkan menuju *integrated and interoperability e-government* atau yang saling berkomunikasi dan terhubung antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya, serta lintas OPD atau yang disebut dengan Smart e-Government,
- Pelaksanaan dan pengawasan implementasi standar operasional pelayanan bagi setiap level birokrasi,
- Peningkatan etos dan kinerja Pemerintah Daerah hingga RT/RW,
- Birokrasi yang bersih, melayani dan berintegritas,
- Data Center yang terintegrasi ke semua SKPD se-Kota Makassar,
- Optimalisasi TIK dalam pengelolaan manajemen birokrasi,
- Pengelolaan anggaran kota yang kredibel dan transparan melalui sistem online,
- Memudahkan masyarakat dalam memperoleh atau mengakses layanan dokumen, layanan perizinan, data kependudukan, dokumen perencanaan, dan dokumen lainnya,
- Mengembangkan *brand* kota melalui kegiatan promosi berkala dan pengembangan produk berciri lokal, serta memiliki unsur kreatifitas dan inovasi yang kuat,
- Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, nyaman, aman dan efisien guna menjadikan Makassar sebagai kota untuk semua,

- Membangun layanan informasi tata ruang digital,
- Adanya standardisasi dan terintegrasi dalam pembangunan wilayah,
- Penukaran sampah dengan kebutuhan masyarakat
  - Pembangunan perumahan murah,
  - Pengembangan pinggiran kota,
  - Penataan Lorong,
  - Pengembangan infrastruktur kota yang aksesibel,
  - Pengembangan *vertical garden* untuk lingkungan sempit perkotaan.
- Tersedia ruang terbuka hijau, ruang ramah anak, dan ruang laktasi di setiap tempat pelayanan publik,
- Menyediakan sistem pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi,
- Mengintegrasikan layanan kesehatan dengan e-Warga,
- Membangun sistem kunjungan kesehatan terintegrasi antara warga dengan dokter ahli, serta layanan kesehatan lainnya,
- Memanjakan LANSIA,
- Membangun sistem keamanan yang kolaboratif dan didukung teknologi,
- Mengimplementasikan elemen cerdas dalam setiap publik CCTV untuk mewujudkan *Smart Monitoring*.

Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar menunjukkan kemajuan dalam implementasi konsep *Smart City* di Kota Makassar itu sendiri. Strategi yang diciptakan dalam membantu kinerja pemerintahan dan keberlangsungan hidup layak masyarakat Kota Makassar menjadi suatu upaya yang tepat dalam pembangunan kota.

## BAB V

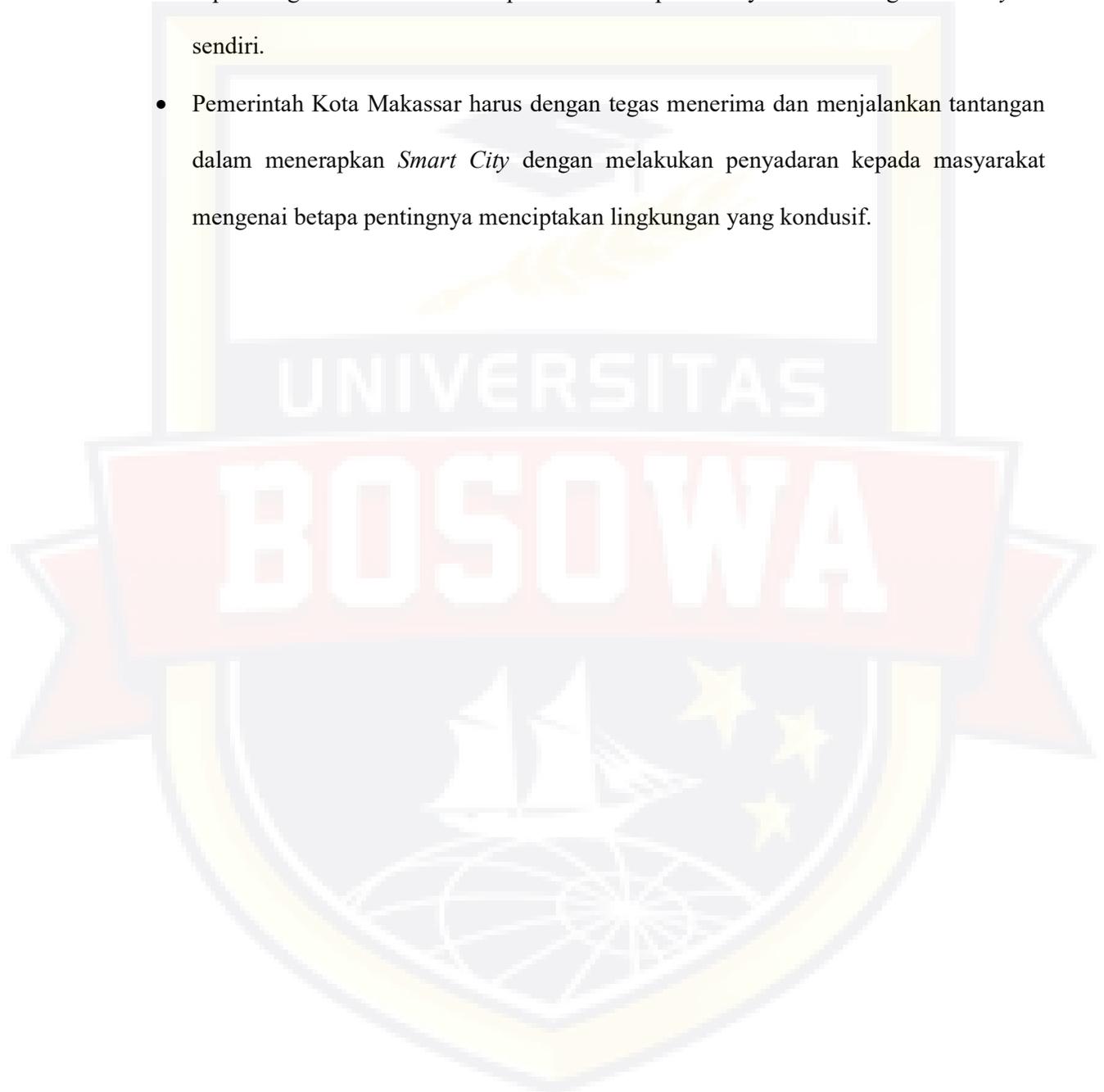
### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

- Kerjasama antara Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dimanfaatkan secara maksimal demi mencapai tatanan kota yang maju dan berkembang.
- Strategi Pemerintah Kota Makassar dalam menerapkan kerjasama berbasis *Smart City* dianggap paling ideal dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di dalam Kota Makassar.
- Smart City merupakan suatu strategi dengan sistem yang dirancang untuk dapat membantu berbagai kegiatan masyarakat, terutama dalam upaya mengelola sumber daya yang ada dengan efisien, serta memberikan kemudahan mengakses kepada masyarakat.
- Strategi Kerjasama Pemerintah Kota Makassar dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dalam upaya pembangunan Kota Makassar menuju *Smart City* adalah berupa; Pengelolaan perkotaan, Bidang Transportasi, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Lingkungan, Bidang Pariwisata, Bidang Ekonomi dan e-Pemerintahan yang meliputi, serta Bidang Infrastruktur.
- Penerapan kerjasama yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kota Makassar adalah berupa program *Operation Room* melalui CCTV, Apartemen Lorong (Aparong), serta *Home Care*.

## B. Saran

- Pemerintah diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan komunikasi dan informatika yang disebarluaskan melalui media dan teknologi terkini secara luas, seperti bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *Smart City* itu sendiri.
- Pemerintah Kota Makassar harus dengan tegas menerima dan menjalankan tantangan dalam menerapkan *Smart City* dengan melakukan penyadaran kepada masyarakat mengenai betapa pentingnya menciptakan lingkungan yang kondusif.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Artikel

Farhan Dean. *Letter Of Intent Between Government Of Makassar City, The Republic Of Indonesia And International Enterprise Singapore, The Republic Of Singapore On Makassar Smart City Development*. Diakses melalui [https://www.academia.edu/31905882/LETTER\\_OF\\_INTENT\\_BETWEEN\\_GOVERNMENT\\_OF\\_MAKASSAR\\_CITY\\_THE\\_REPUBLIC\\_OF\\_INDONESIA\\_AND\\_INTERNATIONAL\\_ENTERPRISE\\_SINGAPORE\\_THE\\_REPUBLIC\\_OF\\_SINGAPORE\\_ON\\_MAKASSAR\\_SMART\\_CITY\\_DEVELOPMENT](https://www.academia.edu/31905882/LETTER_OF_INTENT_BETWEEN_GOVERNMENT_OF_MAKASSAR_CITY_THE_REPUBLIC_OF_INDONESIA_AND_INTERNATIONAL_ENTERPRISE_SINGAPORE_THE_REPUBLIC_OF_SINGAPORE_ON_MAKASSAR_SMART_CITY_DEVELOPMENT).

Ahmad Harakan. 2018. *Paradiplomasi Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur Fisik Dan Sosial Di Kabupaten Bantaeng*. Diakses melalui <https://osf.io/xrvca/download>.

### 2. E-Journal

Amal Muslim. 2018. Kerjasama Pemerintah Kota Makassar Dengan Singapura Dalam Pengembangan Smart City Dibidang Transportasi. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 6, Nomor 4, 2018: 1547-1548*. Diperoleh melalui [https://ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/Jurnal%20Fix%20Amal%20Muslim%20\(10-26-18-03-19-45\).pdf](https://ejournal.hi.fisip.unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/10/Jurnal%20Fix%20Amal%20Muslim%20(10-26-18-03-19-45).pdf).

Laode Muhamad Fathun. *Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar. Indonesian Perspective, Vol 1 No. 1 (Januari-Juni): 75-94*. Diperoleh melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ip/article/viewFile/10430/8304>.

Abdurrozzaq Hasibuan, Oris Krianto Sulaiman. 2019. Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota, Di Kota-Kota Besar Provinsi Sumatera Utara. *Buletin Utama Teknik Vol. 14, No. 2, Januari 2019*. Diperoleh melalui <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/but/article/viewFile/1097/853>.

Priskadini April Insani. 2017. Mewujudkan Kota Responsif Melalui Smart City. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) Volume 2, Nomor 1, April 2017*. Diperoleh melalui <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp/article/download/1423/909>.

Chandra Eko Wahyudi Utomo, Mochamad Hariadi. 2016. Strategi Pembangunan Smart City dan Tantangannya bagi Masyarakat Kota. *Jurnal Strategi dan Bisnis Vol.4, No. 2, Oktober 2016*. Diperoleh melalui <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/79312/4.%20Chandra.pdf?sequence=1>.

Rino Adibowo, Silvia Octa Putri. 2016. Penerapan E-Government dalam Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VI No. 2/Desember 2016*. Diperoleh melalui <https://ojs.unikom.ac.id/index.php/jipsi/article/view/325/293>.

Takdir Ali Mukti. 2015. Paradiplomacy: Bangkitnya Aktor Lokal di Fora Internasional. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Volume 1, Number 1, January 2015*. Diperoleh melalui <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/136/pdf>.

Ario Bimo Utomo. The Paradiplomatic Role of the ConIFA in Promoting Self-Determination of Marginalized Entities. Diperoleh melalui <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/10686/6916>

### 3. E-Book

Alexander S. Kuznetsov. Theory and Practice of Paradiplomacy. *Subnational Governments in International Affairs*. Diakses melalui <http://opac.lib.idu.ac.id/unhan-ebook/assets/uploads/files/05377-027.theory-and-practice-of-paradiplomacy.pdf>

### 4. Berita Online

Muhammad Nur Abdurrahman. Makassar Teken Kerja Sama dengan Pemerintah Singapura Terkait Smart City (2016, 14 November). *DetikNews*. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3345088/makassar-teken-kerja-sama-dengan-pemerintah-singapura-terkait-smart-city>.

UNDP Indonesia. 150 walikota berkumpul untuk Forum Walikota ASEAN kedua di Makassar (2015, 9 September). *UNDP Indonesia*. Diakses melalui <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/presscenter/articles/2015/09/09/150-walikota-berkumpul-untuk-forum-walikota-asean-kedua-di-makassar-.html>

### 5. Website

Website International Enterprise (IE) Singapore. Diakses melalui <https://www.enterprisesg.gov.sg/>

International Enterprise (IE) Singapore. Diakses melalui <https://web.archive.org/web/20180628124749/https://www.smeportal.sg/content/smeportal/en/footer/partners/international-enterprise-singapore.html>

## LAMPIRAN

*Memorandum of Understanding* antara Pemerintah Kota Makassar, Republik Indonesia dengan *International Enterprise (IE) Singapore*, Republik Singapura tentang  
Kerjasama pembangunan Kota Makassar menuju Smart City

Mengingat Pemerintah Kota Makassar (*Government of Makassar City/GOMC*), Republik Indonesia dan *International Enterprise (IE) Singapore*, Republik Singapura, secara kolektif disini disebut sebagai Para Pihak, dan masing-masing disebut sebagai Pihak telah setuju untuk melakukan Memorandum Saling Pengertian, yang merupakan pernyataan minat dari Para Pihak, dan catatan pemahaman antara Para Pihak untuk bekerjasama, dan menjelaskan dasar bekerjasama antara Para Pihak, dan;

Mengingat, mengakui, dan menyetujui bahwa Memorandum ini adalah catatan dan keinginan dari pemahaman Para Pihak dan tidak akan memiliki efek mengikat secara hukum. Para Pihak telah mencapai pemanaman sebagai berikut;

### PASAL 1

#### SASARAN MEMORANDUM

*International Enterprise (IE) Singapore* bertindak sesuai dengan Pasal 2 dari Memorandum ini untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar dalam beberapa bidang yang diatur dalam Pasal 2.

Rincian Bidang kolaborasi akan dimasukkan kemudian dalam Perjanjian Kerjasama yang saling mengikat sebagai pelaksanaan dari Memorandum ini.

Masing-masing Pihak mengakui dan menyetujui bahwa perjanjian tertulis tersebut akan dinegosiasikan dan dimasukkan ke dalam hal kegiatan khusus yang ditetapkan di bawah Pasal 2 dari Memorandum ini.

Para Pihak wajib memperhatikan prinsip-prinsip kejujuran dan itikad baik dalam negosiasi dan pelaksanaan perjanjian lanjut berikutnya dan sehubungan dengan Memorandum ini, dan dalam setiap kegiatan kolaboratif yang dimaksudkan di sini.

## PASAL 2

### LINGKUP KERJASAMA

Pemerintah Kota Makassar menyanggupi untuk berkolaborasi dengan *International Enterprise (IE) Singapore* dan disetujui, melalui instansi terkait yang ditunjuk Pemerintah Singapura dan/atau pihak swasta, untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Makassar dan lembaga afiliasinya dalam satu atau lebih bidang kerjasama, sebagai berikut;

1. Pengelolaan perkotaan yang meliputi; Pengembangan Program deteksi dini dan pengendalian banjir, dan pengembangan sistem saluran drainase terpadu,
2. Bidang Transportasi yang meliputi; Penyusunan *Grand Desain Traffic Light (ATCS/ITS)* Kota Makassar, dan Penyusunan Tatanan Transportasi Lokal yang pintar,
3. Bidang Pendidikan yang meliputi; Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Data Centre Pendidikan dan jaringan IT pendidikan,
4. Bidang Kesehatan yang meliputi; Jaringan *Telemedicine* Kota Makassar
5. Bidang Lingkungan yang meliputi; Pengembangan sistem Pengelolaan pencemaran tanah, air, udara, dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan dan sistem analisis dampak lingkungan,
6. Bidang Pariwisata yang meliputi; Pengembangan sistem pariwisata terpadu dan penyusunan *Master Plan* kawasan wisata,

7. Bidang Ekonomi dan e-Pemerintahan yang meliputi; Program administrasi e-Pemerintahan di Kantor Pemerintahan,
8. Bidang Infrastruktur yang meliputi: Fasilitasi peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, dan fasilitasi sistem yang cerdas, keterpaduan pemanfaatan, dan penataan ruang wilayah.

### PASAL 3

#### JANGKA WAKTU

Diluar hal-hal yang menyatakan berakhirnya atau terjadinya pemutusan Memorandum ini, Memorandum ini mulai dan tetap berlaku untuk jangka waktu satu tahun sejak pelaksanaan kegiatan, dan akan diperpanjang sesuai kesepakatan bersama. Para Pihak selanjutnya menyetujui dan berusaha menyimpulkan dan merumuskan perjanjian tertulis definitif untuk menetapkan syarat dan kondisi dari berbagai hal sebagaimana diatur dalam Memorandum ini dalam waktu enam bulan sejak tanggal pelaksanaan. Secara tertulis, jangka waktu Memorandum ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.

### PASAL 4

#### PELAKSANAAN

Setiap pekerjaan, diskusi, pertemuan atau kegiatan lain yang diperlukan untuk tujuan Memorandum ini dapat dilakukan di kedua negara atau tempat lain yang akan diatur dan disepakati oleh Para Pihak. Rincian spesifik, metode, dan program pelaksanaan Memorandum ini harus dikembangkan dan diselesaikan serta tunduk pada kesepakatan Para Pihak.

### PASAL 5

#### KELOMPOK KERJA, INFORMASI DAN REKOMENDASI

1. Para Pihak dapat membentuk suatu Kelompok Kerja Bersama yang beranggotakan

dari wakil-wakil kedua belah pihak yang wajib melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan evaluasi, pelaksanaan kerjasama yang berada dalam cakupan Memorandum. Kelompok Kerja Bersama akan bertemu apabila dipandang perlu, secara bergantian di Indonesia atau di Singapura,

2. Setiap perwakilan berwenang dari Para Pihak wajib, berdasarkan pengetahuan dan penitaaian mereka pada waktu yang bersangkutan, menggunakan upaya terbaik mereka untuk menyediakan informasi dan bantuan yang diperlukan kepada Para Pihak, untuk tujuan pelaksanaan Memorandum ini. Perwakilan berwenang tersebut harus bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan atau kapabilitas informasi atau bantuan yang diberikan.

## PASAL 6

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Masing-masing pihak wajib menghormati Hak Kekayaan Intelektual pihak lain sesuai dengan hukum nasional yang berlaku di masing-masing negara,
2. Dalam pengaturan khusus, program atau proyek yang menghasilkan kekayaan intelektual Para Pihak wajib memasukkannya dalam pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan nasional yang berlaku di masing masing negara,
3. Apabila salah satu pihak ingin mengungkapkan data dan informasi dari pihak lain atas hasil yang diperoleh Para Pihak dalam pelaksanaan Memorandum ini, Pihak yang akan mengungkapkan rahasia wajib mendapatkan persetujuan tertulis dalam bentuk perjanjian *non-disclosure* dari pihak lain sebelum pembukaan informasi dan data tersebut.

## PASAL 7

### TERJEMAHAN, REVISI, PERUBAHAN DAN KOREKSI

Memorandum ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua naskah memiliki keotentikan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas Memorandum ini, maka naskah dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

Untuk menghindari keraguan, keberadaan kedua versi Memorandum ini tidak dapat ditafsirkan oleh masing-masing Pihak untuk dibuat duplikasi atau penggandaan hak dan kewajiban Para Pihak.

Para Pihak dapat merevisi, mengubah atau mengoreksi seluruh atau sebagian dari Memorandum ini dengan kesepakatan bersama secara tertulis. Setiap revisi, amandemen atau perubahan yang disepakati oleh Para Pihak mulai berlaku dan merupakan bagian dari Memorandum ini pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak. Setiap revisi, amandemen atau perubahan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang timbul dari atau didasarkan pada Memorandum ini sebelum berlakunya revisi, perubahan atau koreksi tersebut.

#### PASAL 8

##### PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap perbedaan atau perselisihan yang timbul dari penafsiran, pelaksanaan atau penerapan setiap ketentuan dari Memorandum ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak dengan itikad baik dan dengan dasar saling menghormati dan saling menguntungkan tanpa merujuk pada pihak lainnya, atau pihak ketiga, atau pengadilan international, organisasi atau forum.

#### PASAL 9

##### PENGAKHIRAN

Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum ini sebelum tanggal berakhirnya yang tercantum pada Pasal 3, dengan memberitahukan Pihak lainnya tentang pengakhiran tersebut. Memorandum tersebut berakhir tiga puluh hari setelah diterimanya pemberitahuan pengakhiran, kecuali pemberitahuan ditarik oleh keputusan bersama Para Pihak sebelum akhir periode ini.